



A. Visi, Misi dan Kebijakan BKPSDM

Visi

Visi adalah suatu pedoman dan pendorong organisasi untuk mencapai tujuannya, yang merupakan gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan organisasi. Membentuk visi organisasi berarti menggali gambaran bersama mengenai masa depan, yang berupa komitmen murni tanpa adanya keterpaksaan. Mengingat visi adalah mental model masa depan, maka harus menjadi milik bersama dan diyakini oleh seluruh anggota organisasi.

Visi harus dapat membangkitkan antusiasme segenap komponen untuk mewujudkan visi bersama. Berpangkal dari pertimbangan tersebut yang disinergikan dengan visi pada grand design kebijakan kepala daerah, yaitu visi dan misi daerah (diacu dari visi/misi Gubernur/Wakil Gubernur terpilih). Adapun visi dan misi Gubernur/Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 adalah *“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera, Berakhlak Mulia dan Ramah Lingkungan ”*.

Mengacu pada esensi Renstra sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka gambaran Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan menetapkan visi yaitu :

“ Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau yang didukung oleh Sumber Daya Aparatur yang Professional Kompeten dan Bermoral “

Visi tersebut mengandung muatan makna profesional yaitu aparatur dituntut untuk memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai dalam pelaksanaan tugas agar dapat memberikan kontribusi kepada organisasi, Kompeten memiliki keterampilan, sikap dan kualitas dan mampu menyelesaikan pekerjaan dengan efektif, efisien dan ekonomis. Bermoral dimana seorang aparatur dapat menjadi panutan di lingkungannya, berbudi pekerti yang luhur dan beretika yang baik.



Misi

Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, maka ditetapkan misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Menyediakan Sumber Daya Aparatur yang sesuai dengan kapabilitas, kompetensi, serta keahlian.

Jika Sumber Daya Manusia tidak tersedia dalam jumlah yang cukup atau tidak sesuai dengan kebutuhan, maka beban kerja yang harus dijalani oleh setiap pegawai akan menjadi berat dan kinerja mereka tidak akan maksimal. Dan apabila jumlah pegawai melebihi dari jumlah yang dibutuhkan, maka akan terjadi kekurangan beban kerja sehingga mengakibatkan penumpukan pegawai/pengangguran (tidak ada pekerjaan).

2. Meningkatkan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Kemampuan seorang aparatur dalam melaksanakan tugas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung peningkatan kinerja aparatur dan organisasi dimana mereka ditempatkan. Sehingga pegawai yang dibutuhkan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang optimal dan menjadikan kinerja yang baik dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.

3. Meningkatkan Pembinaan disiplin kerja dan motivasi kerja aparatur.

Disamping kemampuan untuk melaksanakan tugas, pegawai juga dituntut untuk bekerja keras dan meningkatkan disiplin baik secara individu maupun dalam berorganisasi.

B. Kebijakan

Berbagai kebijakan yang mendasari pelaksanaan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengadministrasian kepegawaian;



2. Melaksanakan rekrutmen secara terbuka dan transparan dengan mengutamakan kompetensi;
3. Melaksanakan pemetaan kebutuhan pegawai dan penyusunan pola karir untuk menghindari praktek-praktek KKN dalam rekrutmen CPNS, Mutasi Pegawai maupun dalam pengangkatan PNS ke dalam jabatan dan pengembangan karir;
4. Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Penjurusan dan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional;
5. Melaksanakan peraturan disiplin secara konsisten;
6. Menyempurnakan sistem penggajian dan menerapkan sistem tunjangan prestasi;
7. Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) melalui peningkatan dan pemeliharaan peralatan yang tersedia secara proporsional guna menyediakan data yang akurat dan tepat waktu;
8. Memberi pelayanan administrasi dan konseling bagi pegawai yang membutuhkan.

C. Program

Program Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kepulauan Riau guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPSDM tersebut diatas, program-program tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Daerah